

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pada Pemilu 2014

(Studi di DPD Partai Golkar Jawa Tengah)

Maria Ayu Nugraheni

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Semarang

Email : ajoe.greenholic@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to clarify how the Golkar Party Central Java Province recruiting for candidates for the legislature. Current open election system, the role of the party had no candidate winning by voting against the party or parties who determine who will enter the cadres in the government but the people who determine which candidates will advance in the parliament as representatives of the people. The emergence of new questions that with this system, the opportunity for political influence money can happen. In fact, this system is expected to function in the recruitment party should further clarified that produced a cadre of qualified cadres. In addition, the Golkar Party declared himself as a modern party which means that the party is ready to change the political climate in Indonesia with a cadre of candidates while maintaining electability. Then how is the role of Local Councils Golkar Party Central Java province in recruiting candidates in the 2014 election? Is the background of the party choose Golkar cadres and how to prepare the candidate as well as the constraints that occur when such recruitment.

This study used qualitative research methods, in which researchers collected data is written and spoken words of research subjects and informants. Field data obtained by conducting in-depth interviews and the literature.

These results indicate that the Golkar Party is a modern party that is still doing the traditional system in recruiting legislative candidates. List of Candidates Golkar Party in Central Java is cadres who have entered more than 5 years with a minimum education requirement bachelor's. In addition, the Team Selection still use personal ties and money to be able to enter candidates. To assist the winning votes for the candidates, the Local Councils will deploy its ability to build a network in each electoral district Local Councils to help although in practice, it is known that sometimes struggles to win the mounting area in each electoral district and still be one of the obstacles that occur for the candidates.

Keywords: Recruitment, Legislative Candidates, Regional Parlement of Central Java, Golkar Party

A. PENDAHULUAN

DPRD merupakan salah satu lembaga legislatif yang memiliki fungsi penting ketika desentralisasi diberikan. Karenanya legislatif daerah adalah unsur dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah serta letak dan kesaling-kaitan pemerintah daerah dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia¹. Urusan di wilayah juga salah satu hal yang perlu menjadi srotan utama karena mengatur tentang proses yang terjadi di wilayah yang tidak terpantau secara intensif dari pemerintah pusat.

¹ B.N. Marbun, S.H., *DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan* (Edisi Revisi), PT. Erlangga, Jakarta, 1993, hal. 1

Dalam menentukan seorang kader yang akan dipilih untuk maju menjadi anggota legislatif maupun yang maju mengisi jabatan publik, ada empat hal yang menunjukkan bagaimana perorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik (Rahat dan Hazan, 2001; Hazan, 2006; Norris dalam Katz dan Crotty, 2006), yaitu:

- a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (Candidacy)?
- b. Siapa yang menyeleksi (Selectorate)?
- c. Dimana kandidat di seleksi?
- d. Bagaimana kandidat diputuskan?

Partai Golkar merupakan salah satu partai tertua dan Indonesia dan dalam kemenangan suara di Jawa Tengah, Partai Golkar selalu berhasil menempatkan partainya pada barisan tiga besar. Berdasarkan AD/ART Golkar, dalam merekrut seorang anggota yang akan dicalonkan dalam pemilihan umum legislatif atau sejenisnya, perlu melalui beberapa tahapan yang ada. Persyaratan tersebut tercantum di dalam AD/ART BAB IV - Kader, Pasal 5. Dari hal tersebut diketahui bahwa dalam proses perekrutan seorang calon anggota Partai Golkar yang akan duduk di kursi pemerintahan sudah tercantum di dalam AD/ART. Dalam Syamsuddin Harris diterangkan bahwa dalam persyaratan khusus Partai Golkar para calon DPRD bahkan diharuskan telah aktif dalam partai minimal lima tahun. Menurut Tri Ratnawati² dijelaskan bahwa Golkar sebagaimana dilaporkan dalam penelitian bahwa kualifikasi calon-calon legislatifnya dipilih berdasarkan:

² Syamsuddin Harris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Hal. xvii - xviii

- a. Dedikasi (skor maksimal 40);
- b. Dukungan yang diberikan kepada calon (skor maksimal 30);
- c. Prestasi, pengalaman dan pengaruh calon (skor maksimal 20);
- d. Keterwakilan perempuan dan pendidikan formal (skor maksimal 10).

Sebagai persyaratan untuk menjadi seorang calon anggota legislatif maupun eksekutif, sudah tercantum di dalam AD/ART yang salah satunya mengharuskan para calon memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan perbuatan tidak tercela (PD2LT) serta menanggapi tanggapan bahwa dari kalangan cendekiawan juga berhak sebagai salah satu yang termasuk dalam kualifikasinya. Namun pada realitanya, apakah sesungguhnya yang terjadi di lapangan dalam pemilu legislatif 2014.

B. PEMBAHASAN

Dalam mencetak kadernya, Partai Golkar tidak *sembarangan* menentukan orang-orang pilihannya yang akan mewakili partai untuk maju. Melalui proses yang matang dan tim yang bertugas menjaring calon anggota legislatif, terkhususnya DPRD, partai sudah melakukan metode persiapan, kaderisasi sampai dengan diklat yang wajib diikuti para calon.

1. Proses Seleksi Calon

Proses awal yang dimulai oleh Tim Seleksi Partai Golkar adalah menentukan kader-kader yang akan disaring untuk kemudian dipersiapkan pada persyaratan-persyaratan lebih khusus. Partai Golkar tidak membuka formulir pendaftaran bagi kalangan umum. Tim Seleksi akan menentukan kader yang dianggap potensial yang kemudian dipilih menjadi pertimbangan untuk diajukan.

Tim Seleksi akan mengirimkan formulir kesediaan kepada fungsionaris yang telah di-SK-kan dalam Penugasan Fungsionaris Pusat atau Fungsionaris Provinsi. Tahapan yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam menentukan pencalonan dimulai pada awal tahun 2013. Terkait pencalonan, Partai Golkar merupakan salah satu partai kader, dimana pencalonan yang dilakukan partai berdasarkan pengkaderan dari internal. Partai mengutamakan kadernya karena kader di dalam merupakan orang-orang yang potensial dan paham akan ke-Golkar-an tersebut.

Dalam hal penjurian, pada calon awal dilakukan oleh Dewan Juri yang dipilih oleh Tim Seleksi. Juri yang dipilih berdasarkan senioritas di partai. Senioritas dalam hal ini merupakan orang-orang yang telah berkiprah di Golkar sudah matang dan lama menjadi kader Golkar. Penjurian atau final seleksi dilakukan paling lambat pada tanggal 5 April 2013. Juri merupakan tim penilai yang akan menyeleksi 300 kader, kemudian disaring menjadi 150 dan dikerucutkan menjadi 100 orang terpilih dalam DCT (Daftar Calon Tetap).

Sistem kaderisasi sangat penting karena mengingat butuhnya transfer pengetahuan tentang politik. Menurut Schattschneider dalam Sigit Pamungkas³ dijelaskan bahwa, apabila partai politik gagal melakukan fungsi rekrutmen politik maka ia akan berhenti menjadi partai politik (Field dan Siavelis, 2008). Rekrutmen politik merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian karena dalam perekrutan politik, apakah Partai Golkar memiliki tipe partai kader.

³ Sigit Pamungkas. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. 2011. Institute for Democracy and Welfarism (IDW). Yogyakarta. Hal 89.

Kaderisasi terhadap para anggotanya merupakan kewajiban bagi suatu partai untuk meneruskan keberlangsungan partai tersebut.

Tahapan kedua setelah memenuhi persyaratan PDLT, calon akan mengikuti TOT (*Training of Trainer*) yang diadakan oleh DPD Partai Golkar. Pengertian TOT yang dimaksud adalah para anggota akan mengikuti pelatihan khusus untuk dipersiapkan menjadi kader Golkar. Setelah mengikuti TOT, dilanjutkan pengkaderan khusus. Misi dari pengkaderan khusus adalah kader yang telah dipastikan akan mendapatkan tugas khusus atau kader yang sedang menduduki/melaksanakan tugas khusus di eksekutif, legislatif atau institusi lainnya. Setelah masuk kedalam “nominasi” penilaian tim seleksi, para kader akan disaring kembali dalam diklat caleg.

2. Latar Belakang Partai Golkar dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif

Persyaratan bagi seorang calon tidak hanya dilihat dari aspek calon tersebut berasal, ada aturan mengikat dari negara yang harus dipatuhi sehingga pencalonan tersebut berkualitas, berkualifikasi, dan transparan. Dari 3 aspek yang telah diuraikan, Partai Golkar juga tim seleksi memperhatikan persyaratan administrasi yang diajukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Persyaratan tersebut tercantum dalam PKPU No. 15, KPU Jawa Tengah 2014. Selain persyaratan dari KPU, Tim Seleksi juga membutuhkan penilaian lain terhadap persyaratan pengajuan calon anggota legislatif. Persyaratan tersebut terlampir dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang disetujui sejak Tahun 2012.

Sesuai dengan penilaian pencalonan saat ini, Tim Seleksi pada penjurian calon anggota legislatif 2014, memiliki kriteria penjurian terbaru mengenai “Lembar Penilaian Bacaleg DPRD Provinsi Jateng” berdasarkan keputusan Munas 5 tahun lalu , yakni⁴:

Tabel 1.1
Kriteria Penilaian

a. Jabatan Kepengurusan Saat ini

No.	Unsur	Jabatan	Kode
1.	DPD Provinsi	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara	A
		Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara	B
		Biro	C
2.	Ormas Sayap Provinsi	Ketua	B
		Harian	C
		Biro	D
No.	Unsur	Jabatan	Kode
3.	DPD Kab/Kota	Ketua	B
		Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Dewan Pertimbangan	C
		Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, Departemen	D
		Ormas Sayap	D
4.	Non Pengurus	-	E

b. Latar Belakang Pendidikan

No.	Kategori	Kode	Nilai
1.	Doktor	D	40
2.	Magister	M	30
3.	Sarjana	S	20
4.	Diploma	Dip	10
5.	SMA	S	0
TOTAL			100

c. Wawancara

No.	Kategori	Kode	Nilai
1.	Baik Sekali	BS	40
2.	Baik	B	30
3.	Sedang	S	20
4.	Cukup	C	10
TOTAL			100

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Aji Wibowo pada tanggal 03 Maret 2014 di DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Peneliti hanya mengetahui data saat wawancara. Data bersifat pribadi dan tidak dapat disebarluaskan.

Keterangan Nilai	Angka
A	40
B	30
C	20
D	10
E	0
TOTAL	100

Selain keputusan penilaian oleh Tim Seleksi, penilaian dilakukan juga oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang meliputi:

Tabel 1.2
Skoring Pembobotan Bakal Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah
Periode 2013-2014

PENGABDIAN 40%	PENUGASAN 25%	PENDIDIKAN 25%	WAWANCARA 10%
Dedikasi Kepengurusan saat ini 30%	Catatan dan Perimbangan Kab/Kota *) 50%	S3 40%	Pemahaman Kegolkaran 20%
Prestasi *) Rekam Jejak 25%	Penugasan dari Pimpinan *) 50%	S2 30%	Ide dan Gagasan Pemenangan 30%
Loyalitas *) 25%	-	S1 20%	Pemahaman ke-DPRD-an 20%
Tidak Tercela *) 25%	-	D3 10%	Citra Diri: Sikap dan Motivasi 30%

*) Penilaian di lakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar

Sesuai dengan peraturan pemilu mengenai kewajiban keterwakilan 30% calon perempuan di Daftar Calon Tetap, Partai Golkar telah memenuhi persyaratan dengan melibatkan sebanyak 36 calon perempuan dan 64 calon laki-laki. Namun walaupun dengan terpenuhinya keterlibatan perempuan sebanyak 30%, hal tersebut belum mampu membawa nama perempuan dalam urutan pertama dalam penomeran. Dari total 10 daerah pemilihan yang ada, hanya ada satu perempuan dalam satu dapil yang mendapat nomer urutan pertama yakni Hj. RA. Kusdilah, SH, MH yang berada pada urutan pertama di dapil 6. Sedangkan

untuk di dapil lainnya, penempatan perempuan umumnya berada di urutan kedua dan terbanyak berada di urutan ketiga.

Sedangkan bagi Tim Seleksi, ada 4 aspek penilaian yang seharusnya dilakukan; Aspek Pengabdian yang meliputi adalah rekaman jejak kader di Partai Golkar selama menjabat sebagai fungsionaris, anggota, ataupun pengabdian di Ormas/Organisasi Sayap Partai Golkar, Aspek Elektabilitas yang membahas peluang terpilihnya calon tersebut di daerah pemilihan. Tim seleksi akan mengadakan survei elektabilitas terbaru di daerah pemilihan sehingga dari hasil tersebut akan muncul nama-nama yang dipilih masyarakat atau tidak, Aspek Penugasan sebagai Fungsionaris adalah ketika fungsionaris telah mengikuti orientasi fungsionaris. Penugasan ini bertujuan agar calon dapat memberikan kontribusi aktif dalam menuntaskan sebuah masalah, dan Aspek Pendidikan merupakan aspek yang harus dimiliki agar para calon memiliki nilai lebih dibanding yang lain. Namun dalam pelaksanaannya, tim tidak melakukan aspek elektabilitas karena dianggap tidak ada hal urgensi untuk turun ke dapil-dapil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berdasarkan wawancara dengan Wagimin⁵, salah satu orang yang terlibat dalam perekrutan tersebut mengatakan bahwa ada hal-hal yang sesungguhnya seorang calon dapat terpilih⁶:

“Haha.. 1. Jasa-2 thd Golkar, 2. PDLT, 3. Financial, 4. Jaringan & Komunikasi di masyarakat, 5. Kedekatan thd ketua, 6. Sing nakal ya bayar kontribusi ke ketua, panitia ato ke kas partai... He...He... 2 ini secret lho n tdk normatif lagi.”

⁵ Nama dirahasiakan

⁶Wawancara dilakukan via SMS pada tanggal 26 Maret 2014 jam 14.08 WIB.

Dari hasil ini wawancara ini peneliti menyimpulkan bahwa ada 6 faktor yang dapat terpilih. Dari faktor-faktor tersebut, peneliti mengerucutkan menjadi 4 hal utama yang menjadi analisis dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan selama penelitian.

1. Uang

Uang merupakan akses setiap kegiatan. Uang yang diberikan dari calon adalah suatu cara agar dapat terpilih. Dalam hal ini, calon tidak hanya memberikan uangnya kepada ketua, tim seleksi, namun juga ke kas partai. Dari data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan penelitian, setidaknya seorang calon membutuhkan uang sekitar 50 juta hanya untuk membayar 3 pihak yang telah disebutkan sebelumnya. Setidaknya, Wagimin⁷ memperoleh uang minimal 10 hingga 25 juta rupiah untuk dapat memasukkan seseorang ke dalam penomoran. Uang ini diberikan calon untuk membantu Wagimin dalam kampanyenya. Wagimin-pun juga merupakan seorang calon namun juga merekrut calon lain. Seperti yang disampaikan oleh Danang⁸ dalam wawancara yang dilakukan pada bulan Januari 2014, ia mengatakan:

“ya gimana mbak, semua ini awalnya sudah dirusak dari pilkada. Awalnya itu ya Pilkada. Ya imbasnya ya sampe sini. Akhirnya semua calon gitu. Lha kalo *nggak* pake uang ya *nggak* bisa jalan. Kalo *nggak* ada uang ya masyarakatnya *nggak* mau dikumpulkan. Mbaknya juga ngalamin to pas kkn, kalo masyarakatnya ditanyain seputar politik pasti ujungnya juga uang. Kalo *nggak* ada uang ya *ngga* mau jawab. Ya sama mbak sama saya. Semua juga gitu. Pake uang biar bisa jalan. Semua sudah kacau..”

⁷ Nama dirahasiakan.

⁸ Nama dirahasiakan.

2. Kedekatan dengan Ketua

Kedekatan dengan ketua adalah aspek penting seorang kader dapat dipilih menjadi fungsionaris DPD, fungsionaris Ormas, Tim Seleksi, perwakilan partai pada acara tertentu dan lain sebagainya. Ketua akan menilai caleg melalui penilaiannya yang tercantum dalam Lembar Penilaian Bacaleg DPRD Provinsi Jateng ketika melakukan penjurian. Ada 5 aspek penting yang akan dinilai oleh Ketua dalam penjurian. Hal tersebut adalah Prestasi yang diukur dari pendidikan calon. Prestasi akan menentukan pandangan masyarakat ketika calon tersebut mencalonkan diri. Penilaian kedua adalah loyalitas. Tidak ada penilaian secara tertulis dan tersirat dalam angka untuk mengungkapkan pernyataan ini. Loyalitas hanya dapat diukur dari keaktifan anggota dalam setiap kegiatan kepartaian. Selain itu, loyalitas hanya diukur dari pengabdianya selama berada di partai. Penilaian ketiga adalah tidak tercela. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa calon yang dipilih adalah calon yang bebas dari masalah hukum maupun perbuatan tidak tercela yang akan mengakibatkan pada penurunan suara calon yang berimbas pada perolehan suara partai. Partai tidak akan berani mengambil resiko apabila calon yang dipilih adalah orang yang memiliki pelanggaran hukum. Bahkan Partai Golkar dalam Keputusan Ketua Pimpinan Pusat bab V tentang Sumber Rekrutmen menjelaskan bahwa salah satu syarat menentukan calon berdasarkan tokoh kemasyarakatannya. Apabila ia adalah orang yang dikenal masyarakat maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi hasil penilaian terhadap pemilihan calon tersebut.

Penilaian keempat selanjutnya adalah Penugasan dari Pimpinan. Penugasan yang dimaksudkan adalah dalam peraturan telah ditetapkan bahwa yang mampu mencalonkan diri setidaknya telah menjadi kader minimal 5 tahun dan pernah menjabat sebagai pengurus Partai Golkar seluruh tingkatan atau anggota fraksi Partai Golkar, atau Ormas Pendiri maupun didirikan Partai Golkar atau Organisasi Sayap dan Pengurus Badan/Lembaga yang dibentuk Partai Golkar. Penilaian terakhir adalah Catatan dan Pertimbangan dari DPD Kabupaten/Kota bagi calon yang berasal dari wilayah lain. Dalam hal ini, adanya memo khusus dari DPD setempat merupakan faktor pendukung calon tersebut terpilih. Faktor uang-pun juga menjadi salah satu faktor pendukung agar sang calon dapat mendapat memo dari Ketua DPD setempat.

3. Jaringan Organisasi

Jaringan organisasi merupakan salah satu penghubung penting. Salah satunya adalah Wagimin yang dulunya adalah mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Beberapa calon juga dahulunya berasal dari HMI, misalnya Ferry Wawan yang kini berada di Dapil 7 nomer urut 1, Aji Wibowo yang berada di Dapil 10 nomer urut 2, dan Aminullah berada di Dapil 9 nomer urut 1. Adanya kesamaan aliran antara organisasi mahasiswa dan partai ini menjadikan pertimbangan bahwa calon tersebut telah mengenal alur perpolitikan sejak duduk di bangku kuliah menjadi pertimbangan penting dibandingkan calon yang bukanlah orang-orang yang menjalani politik praktis maupun mengenal perpolitikan secara mendalam sebelumnya. Hal ini dilandasi ketika *Dr. HM. Iqbal*

Wibisono, SH, MH selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Jateng pada periode 2009-2015 yang juga merupakan anggota HMI dulunya, saat ini memperoleh nomer urut awal. Padahal sebelumnya, pada pemilu 2009-2014, Aminullah mencalonkan diri sebagai caleg menempati nomer urut 7. Hal ini sama seperti yang ditemukan keterkaitan secara tidak langsung yang mengalir pada GMNI - PDIP, maupun KAMMI - PKS. Pada dasarnya, peneliti tidak menerangkan teori secara mendalam pada pernyataan ini. Namun, adanya pandangan maupun loyalitas terhadap sesama organisasi menjadi faktor pendukung dalam hal ini.

4. Kekerabatan

Kekerabatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perpolitikan. Terlebih melihat orang yang terlibat di dalam Partai Golkar kebanyakan adalah penerus dari orangtuanya, saudaranya, maupun kerabatannya. Tidak jarang dijumpai seperti Atut yang dinyatakan di Banten terhadap politik dinastinya. Di Jawa Tengah sendiri, ada beberapa contoh misalnya Seperti Bambang Sadono, SH, MH yang hingga awal tahun 2014 ini menjadi akhir menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014. Kini, Bambang Sadono mencalonkan diri sebagai DPD-RI 2014-2019 sedangkan anaknya akan maju untuk pertama kalinya di Dapil 3 yakni Padmasari Mestikajati, S.Ip, M.Si dengan nomer urut 3. Perolehan nomer urut 3 ini menurut analisa peneliti adalah bagaimana peran Bambang Sadono yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dan juga bagaimana peran wanita yang tidak

terlalu banyak ditempatkan pada nomer urut pertama. Namun berdasarkan analisa dari hasil wawancara dengan Ibu Kusdillah yang memperoleh nomer urut pertama adalah bagaimana peran wanita yang belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat terlebih partai sendiri. Terlebih wanita yang tidak terlalu memiliki uang sebanyak laki-laki (suami).

Selain itu, contoh lain adalah Dewi Utami, S.Ip, M.Si yang berada di Dapil 1 nomer urut 6 dan ayahnya adalah Soejatno Pedro HD yang merupakan salah satu penasehat partai atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jawa Tengah. Melihat dari dua contoh ini, apabila dikatakan politik dinasti, tidak seluruhnya demikian, namun keturunan keluarga yang berkarir sama memang dialami beberapa orang dalam kasus ini terutama di Jawa Tengah.

3. Keterlibatan Partai Golkar untuk mempersiapkan Calon Tetap Anggota Legislatif dalam Pemilu 2014

Upaya Partai Golkar untuk menjalankan fungsinya sebagai rekrutmen politik adalah adanya Diklat Caleg bagi para calon anggota legislatif yang akan maju pada pemilu. Semua calon anggota legislatif akan mendapatkan pelatihan khusus yang dinamakan Diklat Caleg yang didalamnya memuat pengetahuan dan pelatihan menjadi seorang anggota legislatif.

Proses yang akan dilakukan partai adalah mempersiapkan anggota-anggota maupun kader yang akan maju. Kemudian setelah partai menentukan tim yang akan menyeleksi para calon, partai akan mempersiapkan DCS (Daftar Calon Sementara) menuju tahap selanjutnya, yakni DCT (Daftar Calon Tetap) yang

sebelumnya terlebih dahulu akan dikonsulkan kepada DPP Partai Golkar dan dirapatkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie. Setelah adanya persetujuan dari ketua umum, calon akan diajukan pada waktu yang telah dijadwalkan dari pihak KPU telah memenuhi persyaratan. Kemudian partai akan membawa calon dalam penyusunan daftar calon tetap, partai pusat, dalam hal ini akan melimpahkan wewenangnya kepada DPD Provinsi akan mempersiapkan para calon di dapilnya masing-masing serta memberikan akses kepada calon untuk dihubungkan dengan pihak DPD Kabupaten/Kota terkait. Untuk persiapan *atribute* berupa bendera partai, stiker partai, semua akan disediakan oleh partai.

4. Faktor Kendala Proses Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Golkar di Jawa Tengah

Dalam merekrut-pun, ada hambatan yang masih membutuhkan bantuan. Waktu dan biaya yang utama. Ketika melakukan penilaian ke tiap dapil terhadap pengaruh caleg terhadap masyarakat. Terkadang, karena tidak memiliki waktu banyak, Tim Seleksi akan dibantu oleh patnernya untuk *survey* ke daerah pilihan ataupun menghubungi DPD Kabupaten/Kota setempat untuk melakukan penilaian. Hambatan lainnya adalah mengenai waktu, biaya merupakan hal yang sensitif untuk semua bagian dari kehidupan. Untuk melakukan agenda kegiatan diklat dan semacamnya diperlukan pendanaan yang cukup banyak. Selain itu, masalah internal antar calon yang masih terjadi pada umumnya adalah:

- a. Singkornisasi antara calon karena semua ingin menang. Terkadang hal ini jelas menjadi pemicu dalam internal. Dengan situasi sistem pemilu terbuka, siapapun dapat mengajukan diri dan memperoleh kekuasaan.
- b. Zona penetapan baliho. Pemerintah kabupaten/kota setempat tidak mengatur sedangkan semua calon ingin agar dirinya dikenal oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya muncul pemasangan pamflet kecil di pohon, tembok.
- c. Tidak adanya ketegasan pihak Bawaslu dan KPU dalam penanganan kecurangan oleh caleg. Partai tugasnya hanya mengingatkan jalur para caleg. Namun selebihnya merupakan wewenang KPU dan Bawaslu.

C. PENUTUP

1 Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup dari kajian penelitian, dimana pada bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 (Studi di DPD Partai Golkar Jawa Tengah)”. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus di DPD Partai Golkar Jawa Tengah.

Pada bab ini, akan dibagi menjadi 4 bagian yaitu: (1) Kesimpulan, (2) Rekomendasi, (3) Kelebihan dan Kekurangan dalam Penelitian, (4) Agenda Penelitian Mendatang.

1.1 Kesimpulan

1. Dari hasil kesimpulan penelitian Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 (Studi di DPD Partai Golkar Jawa Tengah) adalah pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Bab VII tentang Tata Cara Penentuan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Golkar. Dalam hal persyaratan, calon tidak menggunakan formulir yang dibagikan secara umum namun mendapat edaran khusus yang diberikan Tim Seleksi dengan menimbang persyaratan Partai Golkar yakni:
 - a. Menjadi Anggota Partai Golkar yang dibuktikan dengan NPAPG dan/atau KAPG.
 - b. Aktif sebagai anggota sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat dicalonkan atau pada tanggal 9 April 2013.
 - c. Telah mengikuti Orientasi Fungsiionaris yang diselenggarakan DPP/DPD Provinsi dibuktikan dengan sertifikat dan/atau SK Penugasan Fungsiionaris.
 - d. Telah melaksanakan penugasan fungsiionaris.
 - e. Berpendidikan minimal Diploma 3 (D3) atau sederajat.
 - f. PD2LT (Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela).
 - g. Persyaratan telah dipenuhi seluruhnya oleh bakal calon.
2. Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif ditentukan oleh Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pertimbangan susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 28 orang yang terlibat di dalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata yang masuk dalam tim juga merupakan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai caleg. Terdapat 15

anggota tim seleksi yang juga merupakan caleg. Sehingga, dalam keputusan penetapan caleg masih ditemukan banyak temuan pelanggaran di dalamnya. Terutama dalam keputusan dewan pimpinan pusat bahwa yang menjadi tim seleksi adalah wakil ketua terkait dan apabila berhalangan digantikan oleh Sekretaris terkait, namun realitanya Bendahara-pun ikut berperan sebagai Tim Seleksi. Padahal Bendahara yang terlibat sebagai Tim Seleksi-pun juga merupakan caleg.

3. Selain itu, penilaian tim seleksi yang meliputi 4 aspek yakni aspek pengabdian, aspek elektabilitas, penugasan sebagai fungsionaris, dan pendidikan telah dijalankan. Namun pada prakteknya tidak sepenuhnya syarat penilaian Bacalaeg dipenuhi. Hanya 3 aspek yang dinilai yakni aspek pengabdian, penugasan sebagai fungsionaris, dan pendidikan, sedangkan aspek elektabilitas tidak dilaksanakan karena dikatakan tidak ada urgensinya untuk turun ke dapil.
4. Terdapat temuan bahwa kejanggalan pada PD2LT. PD2LT yang di “agungkan” ternyata masih menjadi pertanyaan ketika ukuran dedikasi dan disiplin masih menjadi penilaian normatif tim seleksi. Selain itu, terdapat temuan mengenai aspek politik yang mempengaruhi penilaian Ketua, Tim Seleksi dan Juri, yakni:
 - a. Kekerabatan
 - b. Uang
 - c. Relasi dengan pengurus inti maupun kedekatan dengan Ketua
 - d. Sumbangan kepada Ketua, Tim Seleksi, dan Kas Partai
5. Seiring berjalannya perekrutan tersebut, hambatan juga merupakan tantangan bagi para calon dan Tim Seleksi untuk mempersiapkan kadernya. Dari internal

pun sering dijumpai para calon saling menjelekan. Kelemahan pada penggunaan Sistem Proporsional Terbuka adalah persaingan antar calon semakin menjadikan tidak adilnya dalam penentuan calon. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih orang yang tepat dibandingkan mendapatkan uang lima puluh ribu ataupun seratus ribu menjadi hambatan.

2. Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan di atas maka penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan rekomendasi untuk pihak terkait, sebagai berikut:

1. Tidak adanya diskriminasi oleh Tim Seleksi dalam perekrutan calon anggota legislatif. Tim Seleksi seharusnya orang-orang yang terdiri dari pengurus yang tidak/belum mencalonkan diri sebagai bagian dari pemilu pada periode tersebut. Hal ini akan memicu adanya ketidak-adilan di dalamnya terutama dalam pemilihan DCT (Daftar Calon Tetap).
2. Untuk penomoran sebaiknya diputuskan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penomoran merupakan wewenang Ketua DPD maka hal tersebut menjadi tidak transparan dan penomoran harus menyesuaikan dan melihat profil calonnya.
3. Mencoret garis besar terhadap adanya “orang titipan”. Tidak memungkiri bahwa tim mendapatkan titipan orang dan yang menjadi prioritas bagi Calon Anggota Legislatif di Jawa Tengah tetap adanya keterkaitan daerah. Hal ini akan memicu diskriminasi, perpecahan dalam internal partai.

4. Keputusan bagi Tim Seleksi harus ketat dan disiplin. Keetika ia masih merupakan seorang fungsionaris partai sedangkan ia akan mencalonkan diri sebagai caleg, maka ia harus melepaskan jabatannya sebagai fungsionaris dimanapun dia berada dan tidak akan mencantumkan diri kembali sebagai fungsionaris sebelum terpilih lagi dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar.
5. Tidak adanya tindakan kriminal atau kecurangan dalam pemilu terlebih adanya pemalsuan surat suara.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Alkhatab, Umar Ibnu. 2009. *Dari Beringin Ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar*. Yogyakarta: Ombak.
- Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat: Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif: DPR, DPRD, & DPD*, Jakarta: Visimedia.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Erlangga.
- Karim, M. Rusli. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Jogjakarta: PT. Tiara Wacana.
- Magenda, Burhan. 1992. *Sikap Politik Tiga Kontestan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun B.N. 1993. *DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Prasdi, Nanang Dwi, dkk. 1999. *Golkar Retak*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sunardian, Wirodono. 2008. *Pintar Jadi Caleg, Jadi Caleg Pintar*. Yogyakarta: Alfamedia.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Sutardi, Ahman. 2009. *Jangan Pilih Saya: Kisah Anekdote Pemilu, Suatu Refleksi Bagi Caleg, Pilkada, Capres, dan Cawapres*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Sumber lain :

Pengurus Kelompok Disuksi Wartawan Jawa Tengah. 2005. *DPRD Jawa Tengah: Dulu, Sekarang, dan Kedepan*.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Sekretariat Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, *Buku Saku Anggota Partai Golkar 2004-2009*.

PKPU No. 15, KPU Jawa Tengah 2014.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/1/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar.

Internet :

<http://www.golkarjateng.com/>

<http://www.kpu-jatengprov.go.id>